

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERJUANGAN TAMAN SISWA

(1922 – 1945)

1. Politik Etis dan kelahiran Taman Siswa

Pada zaman pemerintah kolonial Belanda pendidikan hanya diberikan kepada orang-orang Belanda dan segelintir orang pribumi saja. Fasilitas sekolah untuk orang Belanda dan Eropa pun jauh lebih baik dibandingkan sekolah untuk pribumi. Dalam pelaksanaan pendidikan, pemerintah kolonial Belanda bertanggungjawab untuk membuat peraturan tanpa kewajiban menyediakan sekolah. Selama pertengahan abad ke-18, awal pemerintah Belanda tak menyediakan satu sekolah pun bagi anak-anak Indonesia. Alasan yang diberikan ialah untuk menghormati bumiputera serta lembaga-lembaga mereka dengan membiarkan penduduk dibawah bimbingan pemimpin-pemimpin mereka.¹

Alasan lain ialah kesulitan finansial yang berat dihadapi Belanda sebagai akibat Perang Diponegoro (1825—1830) yang mahal dan menelan banyak korban yang ditaksir kerugian ini mencapai 20 juta gulden dan korban jiwa sebanyak 15 ribu, karena perang tersebut pula kebijakan sewa tanah menemui kegagalan.²

Di lain pihak, pada saat itu demi memperkuat kedudukannya di tanah jajahan Belanda membagi sistem sosial masyarakat menjadi beberapa kelas dengan hak dan kewajiban yang berbeda, yaitu kelas Eropa sebagai strata

¹Prof.Dr.S.Nasution,*Sejarah Pendidikan Indonesia*(Jakarta :Bumi Aksara,1994), h.11

² Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* (Jakarta : LP3ES, 2003)h,5

teratas, Timur tengah, dan Cina berada di Strata kedua, kaum bangsawan Indonesia menjadi strata ketiga, lalu di lapisan paling bawah ada strata rakyat biasa.

Pemerintah kolonial Belanda memang tidak memiliki kewajiban dalam menyediakan sekolah dan menyekolahkan pribumi. Namun, bukan berarti tidak ada pendidikan bagi rakyat pribumi serta tidak adanya sekolah di tanah jajahan. Pendidikan pribumi kala itu, berorientasi atau berlandaskan agama. Jika kaum pribumi bisa bersekolah di sekolah Belanda, maka hanya anak priyayi yang mempunyai kekuasaan tradisional dan mampu menjamin keberhasilan berjalannya kebijakan Belanda.

Pembagian strata tersebut dilakukan guna menjaga kekuasaan dan kemungkinan munculnya kesadaran untuk melakukan perlawanan dari rakyat biasa. Seiring perubahan iklim politik di negeri Belanda di pertengahan abad ke-19, kemenangan partai liberal dan dicetuskannya politik etis. Pada 1854 Thorbecke, salah seorang pemimpin utama partai liberal mengemukakan pendekatannya dalam kebijaksanaan kolonial di depan parlemen Belanda, ia mengatakan :

“Adalah tugas kita, kewajiban kita, untuk menyebarkan cahaya di Hindia Belanda, bila orang Jawa diberitahukan tentang sejarahnya sendiri, itu akan menyadari apakah ia tanpa kita dan bila kita buka baginya jalan ke kebudayaan kristen, saya percaya tuan ketua, dengan cara demikian, lebih daripada yang lain, pertalian akan dipererat antara Hindia Belanda dengan negara kita. Kesamaan kepentingan harus menjadi dasar dan inti hubungan kita dengan bangsa jajahan, dan itu hanya timbul dari perkembangan spiritual maupun material yang kita bawa kepada mereka”.³

Thorbecke tidak menyangkal bahwas pemasukan sebagian besar berasal dari tanah jajahan. Namun, model eksploitasinya harus diperbaharui dan lebih melibatkan pihak swasta. Pada 1899, terbit sebuah artikel oleh Van Deventer,

³ Prof.Dr.S.Nasution,*Sejarah Pendidikan Indonesia*(Jakarta :Bumi Aksara,1994), h.12

berjudul Hutang kehormatan dalam majalah *De Gids*. Dalam artikelnya tersebut ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara.⁴

Setiap orang tahu bahwa Indonesia menyumbang sangat besar pada kas keuangan negeri Belanda, dan pada periode 1851 hingga 1870 saja laba bersih yang dikeruk rata-rata sekitar f.24.000.000 pertahun.⁵ Atas dasar tekanan tersebut keluarlah kebijakan Politik Etis, Politik etis sendiri dicetuskan oleh Van Deventer yang merupakan seorang dari kalangan partai liberal.

Politik etis adalah sebuah politik yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan dalih sebagai balas budi dan sebagai rasa prihatin pemerintahan kolonial melihat nasib tanah jajahan yang sangat menyedihkan dan menjadi bahan pembicaraan tersendiri di parlemen Belanda. Politik etis menyatakan, negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan mengubah perspektif bahwa Indonesia adalah daerah yang menguntungkan menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya. Apalagi jika melihat kondisi masyarakat yang kala itu sedang mengalami kesusahan yang diakibatkan oleh *Cultur Stelsel*. *Cultur stelsel*⁶ sendiri atau yang lebih dikenal dengan Tanam Paksa berhasil memulihkan kembali perekonomian negeri Belanda namun setelah pertengahan abad ke-19.

Penerapan sistem ini mulai memperlihatkan penyimpangan-penyimpangannya dan mulai menumbuhkan ketidakstabilan dalam ketersediaan pangan.

⁴ Prof.Dr.S.Nasution,*Sejarah Pendidikan Indonesia*(Jakarta :Bumi Aksara,1994),, h.15

⁵ Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa* (Jakarta : LP3ES, 2003)h,190

⁶ *Cultur Stelsel* atau tanam paksa adalah sebuah system dimana rakyat diwajibkan menanam tanaman untuk diekspor, Sistem ini dijalankan atas dasar kekosongan kas Belanda akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh Masyarakat.Terlebih perang Diponegoro yang memakan dana besar. Sistem ini diajukan dan dijalankan oleh Van den Bosch dengan maksud mendatangkan keuntungan dengan cara – cara cepat.

Ada tiga pilar pelaksanaan politik etis yaitu *Irigasi*, *Edukasi*, dan *Emigrasi*. *Irigasi* artinya membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. *Emigrasi* yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi karena memang penduduk di tanah Jawa semakin banyak sehingga lahan produktif pun berganti menjadi pemukiman dan alhasil solusinya adalah memindahkan sebagian masyarakat ke daerah Sumatera ataupun Kalimantan. *Edukasi*, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Pelaksanaan pilar *Edukasi* dibuktikan dengan ditambahnya dan perbaikan pendidikan untuk orang Indonesia, namun pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial adalah sebuah sarana mobilitas sosial dan lebih sering digunakan kaum priyai agar bisa menduduki tingkatan sosial yang lebih tinggi. dan bukan digunakan untuk memberi pendidikan yang layak kepada rakyat biasa. Tujuan Politik Etis dapat disimpulkan sebagai usaha mencapai kesejahteraan melalui irigasi, emigrasi, reformasi, pendewasaan, perwakilan, dan pendidikan.

Agar lebih mampu mengupayakan reproduksi sosial di dalam struktur masyarakat, sebagai pemilik modal ekonomi dan modal sosial lainnya, usaha-usaha kaum priyai dilanjutkan dengan mengirimkan anak laki-laki mereka ke sekolah-sekolah untuk orang Eropa di Hindia supaya mereka dapat belajar bahasa Belanda dan dapat berada dalam barisan guna memperoleh kedudukan yang baik dalam dinas pemerintahan.⁷ Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial pun bertingkat-tingkat seperti diadakannya ELS (*Eurospeech Lagere School*) atau HIS (*Hollandsch Inlandsch School*) yang

⁷Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta :Pustaka Jaya, 2009), h.77

diperuntukan bagi anak Eropa atau Belanda dan sedikit anak Bangsawan kelas tinggi, bagi anak priyayi bisa bersekolah hingga ke sekolah Belanda dan Eropa. Sementara untuk anak rakyat biasa diselenggarakan sekolah rakyat yang setingkat Sekolah Dasar (SD) dengan bahasa pengantar bahasa Melayu atau bahasa daerah.

Diskriminasi yang dilakukan pemerintahan kolonial ternyata membuat keresahan dari tokoh pergerakan nasional seperti Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Tjiptomangunkusumo, dll yang pada saat itu memang sedang semangat membicarakan membebaskan nusantara dari tangan pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-20 di negara–negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia timbul pergerakan rakyat yang menggunakan nasionalisme sebagai kekuatan penggerakannya.⁸ Nasionalisme tersebut dicampur pula dengan gagasan demokrasi yang dibawa pelajar Indonesia ketika belajar di sekolah atau di negeri Belanda. Pergerakan ini muncul untuk memberi jawaban terhadap tantangan yang berupa situasi penjajahan pada waktu itu.

Apabila selama tahun 1900—1914 ada suasana baik terhadap haluan politik etis dan tidak banyak terdengar kritik terhadap politik itu. Sejak 1914, masyarakat mulai bergejolak dan banyak melancarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis gagal.⁹ Keresahan akan keadaan yang tidak membaik setelah diadakannya politik etis membuat para tokoh pergerakan pun mulai melakukan gerakan untuk membebaskan rakyat dari keadaan yang semakin tidak membaik. Periode itu dalam sejarah Indonesia biasa disebut dengan periode Pergerakan Nasional yang ditandai dengan munculnya Budi Utomo.

⁸ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta :Proyek IDSN, 1989), h.33

⁹ Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 45

Pada perkembangannya, Budi Utomo hanya membataskan diri pada daerah Madura dan Jawa serta tidak melibatkan diri pada gerakan politik, memunculkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Pemerintah yang mengawasi perkembangan Budi Utomo sejak berdirinya dengan penuh perhatian dan harapan, akhirnya menarik kesimpulan bahwa pengaruh Budi Utomo terhadap penduduk pribumi tidak begitu besar.¹⁰

Sejalan dengan ketidakpuasan akan politik dan langkah yang diambil Budi Utomo maka muncul organisasi lain seperti *Indische Partij* dengan Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat, Tjokroaminoto dengan Sarikat Islamnya, Sarikat Islam berasaskan dasar spritual agama dan kepentingan dagang bersama sementara *Indische Partij* berdiri atas slogan “Nasionalisme Hindia” bergerak dalam bidang politik. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi perjuangan bangsa Indonesia yang sebelumnya masih hanya dalam perjuangan bersenjata yang tidak terorganisir dengan baik dan belum berorientasi ke kemerdekaan bangsa Indonesia.

Salah satu organisasi yang dikenal sangat keras dan radikal adalah organisasi yang dipimpin oleh tiga serangkai, Douwess Dekker, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dan Tjipto mangunkusumo yang diberi nama *Indische Partij (IP)*. Apabila perkumpulan Budi Utomo dan Sarekat Islam secara sadar ataupun tidak sadar menerima pada waktu itu tata hubungan “Ibu negeri dan daerah jajahan” maka IP sebaliknya menentang itu dan menyatakan sebagai cita-citanya kemerdekaan Hindia.¹¹

Indische Partij dikenal sangat keras menentang Belanda melalui tulisan-tulisannya. Hal tersebut ternyata membuat marah pemerintahan

¹⁰Ibid., h.337

¹¹Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinarharapan , 1986) , h.48

kolonial. Terlebih lagi dengan tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Seandainya Saya orang Belanda” yang isinya ialah merupakan reaksi terhadap rencana Pemerintah Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda dari Prancis yang diadakan di Indonesia. Sindiran Suwardi melalui tulisan-tulisannya di beberapa surat kabar menyulut kemarahan Belanda, puncaknya Gubernur Jenderal Idenburg memerintahkan agar Suwardi diasingkan ke Pulau Bangka tanpa proses peradilan terlebih dahulu.¹² Namun atas dasar permintaan kedua rekannya serta pertimbangan lainnya akhirnya mereka memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.

Suwardi Suryaningrat berada di tanah pengasingan selama kurang lebih 6 tahun (1913—1919), meskipun sebenarnya ia sudah bebas dari pengasingannya pada 1917 namun ia baru kembali ke tanah air pada 1919. Di tanah pengasingannya di Belanda, ia tetap bergelut di ranah jurnalistik seperti yang dilakukannya di Indonesia. Ketika berada di Negeri Belanda perhatian Suwardi tercurah kepada masalah-masalah pendidikan dan pengajaran di samping bidang sosial-politik. Ia menambah pengetahuannya dalam bidang pendidikan dan pada 1915 berhasil memperoleh akte guru.¹³

Pada 5 September 1919, Suwardi dan keluarganya mendarat di Tanjung Priok. Sepulangnya dari pengasingan ternyata tidak membuat Suwardi mengendurkan perjuangannya justru perjuangannya semakin dianggap radikal oleh pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial mengawasi Suwardi dan segala aktifitasnya. Pada waktu itu Suwardi bekerja di sekolah Adi Dharma, milik Suryopranoto yang merupakan kakak Suwardi Suryaningrat. Sekolah Adi Dharma adalah sekolah partikelir, yang untuk

¹² Imam Ghazali, *Ki Hajar Dewantara Pendidik Nasionalis yang Agamis* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2013), h.2

¹³ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta :Proyek IDSN, 1989), h. 72

pertama kali didirikan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk HIS.¹⁴ Ia berpendapat bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan untuk rakyat tidak hanya ditempuh melalui jalur politik melainkan harus ditempuh lewat pendidikan.

Perjuangan lewat pendidikan menjadi sebuah metode baru bagi pergerakan nasional. Pada zaman penjajahan, sejalan dengan pergerakan nasional, pendidikan bangsa sendiri merupakan program hampir setiap organisasi politik maupun kebudayaan. Bentuknya beraneka ragam, berupa kursus-kursus pengetahuan umum tertulis dan lisan, kelompok-kelompok diskusi, kursus-kursus politik, perpustakaan umum, dan sekolah-sekolah umum.¹⁵ Persentuhan Suwardi dengan dunia pendidikan di Indonesia lewat Sekolah Adi Dharma menimbulkan sebuah gagasan tentang pendidikan yang dirasa pas untuk menjawab persoalan di tanah jajahan, namun ia tidak bisa serta merta menuangkan idenya karena itu adalah sekolah milik kakaknya, maka Suwardi bercita-cita mendirikan sekolah sendiri.

Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suwardi bergabung pada “*paguyuban selasa kliwonan*” di Yogyakarta. Paguyuban ini disingkat “Saka”. Paguyuban ini berusaha menaikan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Paguyuban selasa kliwon mengadakan perundingan berulang-ulang yang akhirnya menelorkan dasar-dasar untuk pendirian perguruan yang menanam pendidikan kebangsaan¹⁶. Dasar-dasar serta cita-cita yang dibawa oleh Paguyuban ini terealisasi dalam perguruan yang dinamakan Perguruan Taman

¹⁴ Abdurrachman Surjomihardjo, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Modern* (Jakarta : Sinarharapan , 1986) ,h.74

¹⁵Ibid., h.25

¹⁶ S.A Soedibjo , *Sedikit tentang organisasi Taman Siswa*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta : UST Press, 1952)h, 175

Siswa. Taman Siswa berdiri pada 3 Juli 1922 didirikan atas dasar inisiasi anggota Paguyuban Saka dan dimanifestasikan oleh Suwardi Suryaningrat.

Maksud untuk mendirikan sekolah ini disetujui oleh kakaknya. Bahkan Suwardi diberi modal berupa murid dan bangku sekolah. Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari perjuangan anti-kolonial dan anti-sekolah yang dibangun pemerintah. Sebab, pendidikan ala pemerintahan kolonial tidak cocok dengan perjuangan bangsa dan menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan. Setelah Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta serta setelah diketahui bahwa Taman Siswa dapat hidup langsung sebagai penyebar cita-cita Selasa Kliwon, maka kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri.¹⁷

Seperti sekolah dan organisasi pada umumnya Taman Siswa juga memiliki dan membuat anggaran dasarnya sendiri yang disebut azas 1922. Azas 1922 adalah sebuah azas yang digunakan Taman Siswa sebagai landasan perjuangan. Azas Taman Siswa diresmikan pada 7 Agustus di Kongres Taman Siswa pertama.

Azas ini harus tetap hidup selama nama Taman Siswa tetap digunakan. Pada azas ini, Suwardi coba menjelaskan bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa barat hanya akan membuat Bangsa Indonesia ketergantungan kepada bangsa-bangsa barat dan membuat lulusannya mengabdikan kepada kepentingan kolonial bukan kepada kepentingan nasional. Dengan demikian, Suwardi coba menggagas sebuah sistem pendidikan baru yang berpihak kepada masyarakat pribumi. Sistem pendidikan yang sifatnya berkiblat kepada kebudayaan nasional bukan kepada kaum kolonial dan juga pendidikan yang

¹⁷Moh. Said Reksohadiprodjo, *Taman Siswa dan Alam gagasannya*, dalam *Taman Siswa 50 Tahun*, (Yogyakarta : Majelis Persatuan Taman Siswa, 1972)h. 132

baru ini harus menyentuh segala golongan bukan hanya diberikan kepada kelas atas atau kepada kaum bangsawan saja. Sesuai dengan sifat pendidikannya yaitu, kultural nasional, Taman Siswa berbentuk perguruan yaitu tempat berguru, tempat murid mendapat pendidikan, dan pula tempat kediaman guru.¹⁸

Demi menyelenggarakan itu semua maka harus diupayakan kemerdekaan terlebih dahulu. Kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan diri sendiri yang tidak bergantung kepada orang lain sebelum nantinya menuju kemerdekaan nasional. Hal itu dipraktikkan dengan tidak menerima bantuan dari pemerintahan kolonial yang disinyalir akan mengekang perjuangan bangsa Indonesia dalam hal meraih kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Oleh sebab itu, Taman Siswa dengan tegas menolak bantuan dari pemerintahan kolonial dan berupaya berdiri sendiri dalam pembiayaan operasional pendidikannya.

Berdirinya Taman Siswa sebagai organisasi yang berdiri di bidang pendidikan mendapat banyak reaksi. Reaksi – reaksi terhadap Taman Siswa yang baru didirikan itu bermacam-macam, ada orang yang mendukung dan turut serta dalam gerakan pendidikan itu ada pula yang menentangnya--terutama guru-guru di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial.¹⁹ Tidak saja ditentang oleh guru-guru sekolah pemerintahan kolonial, Taman Siswa juga dianggap sebagai sekolah komunis. Tentu hal ini menjadi cobaan yang cukup memprihatinkan jika melihat maksud dan tujuan Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.

Dengan langkah diplomatis Suwardi memerintahkan untuk tidak berkata apa-apa terhadap para pengkritik, dan menerima mereka yang sepakat

¹⁸Wismulyani, *Endar Pendidikan Masa Kolonial* (Pati:Cempaka Putih,2008), h.76

¹⁹Kenji Tsuchiya, *Democracy and Leadership : The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia*, terj. H.B. Jassin (Jakarta : Balai Pustaka,1992), h.107

kepada Taman Siswa selama satu windu lamanya, “Selama satu windu (delapan tahun) janganlah kita berkata apa-apa,” kata Suwardi.²⁰ Selama diamnya Taman Siswa akan kritikan dari guru dan pegawai pemerintahan kolonial dengan alasan standar pendidikan yang tidak memadai hingga tuduhan sekolah komunis, Taman Siswa justru mendapat permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan Sekolah Taman Siswa disana.

Pada 31 Desember Suwardi 1922 berunding dengan Soetatmo Soerikosoemo yang merupakan petinggi Budi Utomo dan rekanan Ki Hajar di Kelompok Selasa Kliwon untuk menentukan sifat dan kegiatan-kegiatan Taman Siswa di masa depan.²¹ Soetatmo Soerikosoemo mengundang pemimpin-pemimpin Taman Siswa ke rumahnya untuk menyampaikan kepada mereka pembicaraannya dengan Soewardi dan dibentuk Komite Sentral untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan Taman Siswa.

Sekolah-sekolah cabang Taman Siswa diberikan wewenang dan otonom dalam kegiatannya sesuai dengan kebudayaan daerahnya masing-masing sehingga sesuai dengan cita-cita Taman Siswa yang berkiblat pada kebudayaan nasional. Di samping itu demi menjaga ketertiban dan wibawa Taman Siswa, Suwardi diberi “Hak Diktator” karena sejatinya memang Taman Siswa menolak demokrasi ala barat yang sangat liberal, sehingga Taman Siswa menerapkan kebijaksanaan kepemimpinan agar Taman Siswa tetap dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Azas 1922. Seiring dengan itu semua cabang Taman Siswa di beberapa daerah mulai berdiri dan seiring waktu banyak pula permintaan kepada Komite Sentral untuk mendirikan di daerahnya masing-masing sehingga menjelang Maret 1923 sekolah Taman Siswa

²⁰ Ibid

²¹ Ibid., h.108

telah didirikan di empat kota yakni Tegal, Cirebon, Surabaya, dan Wonokromo.

Permintaan untuk mendirikan cabang Taman Siswa datang dari hampir seluruh pulau Jawa. Dengan dukungan terhadap tujuan perjuangan Taman Siswa, maka Taman Siswa melalui Komite Sentral mengadakan kongres pada 20-23 Oktober 1923. Pada kongres tersebut disusun lah jadwal pelajaran dan penjelasan dari azas 1922 yang telah disusun, Komite Sentral dirubah dan disusun ulang menjadi Majelis Luhur. Disini Suwardi masih diberi wewenang lebih dalam menentukan kebijakan sehingga peraturan organisasi belum sepenuhnya diatur dan masih diserahkan kepada cabang masing-masing. Jumlah sekolah Taman Siswa terus tumbuh dengan cepat menjelang juli 1930 (sebulan sebelum kongres nasional pertama Taman Siswa) ada lima puluh dua sekolah di seluruh Indonesia. Dua puluh empat sekolah baru dibuka sejak menjelang akhir tahun sebelumnya.²²

Terhitung hingga tanggal 1 Maret 1950 cabang Taman Siswa bahkan sudah mencapai 79 cabang dengan jumlah murid 29.650 dan 650 guru.²³ Berdirinya cabang-cabang dikota lain serta dukungan yang semakin banyak dari berbagai kalangan membuat Taman Siswa menjadi salah satu organisasi besar yang mampu menaungi berbagai kalangan dan sifatnya berskala nasional.

Terbukti didalam susunan kepengurusannya terdapat beberapa tokoh pergerakan nasional yang berkecimpung di PNI dan yang nantinya akan menjadi tokoh nasional di Republik Indonesia yaitu Ali Sastroamidjojo yang menjadi komite regional di Surabaya dan Soekarno yang menjadi komite regional di Bandung. Taman Siswa meperbolehkan anggotanya untuk masuk

²²Ibid., h.137

²³Pusara Maret 1950,h.12

atau bergabung dengan organisasi lain seperti yang ditulis oleh M, Tauchid dalam majalah Pusara :

Masoek dalam pergerakan politik adalah satoe hak ~ bahkan wadjib~ Bagi tiap-tiap pendoeoek negeri jang soedah dewasa. Djadi dengan sendirinja ta' berhaklah Taman Siswa melarang anggota-anggotanja masoek dalam partai politik, teroetama djika mengingat bahwa Taman Siswa mempoeajai dasar „kemerdekaan”, jang, ta' boleh mengikat seseorang oentoek mengerdjakan sesoeatoe jang ta' meroegikan hidoepnja, masjarakatnja ataupoen gerombolanja.²⁴

Dalam tulisan itu M, Tauchid juga mengutip aturan Taman Siswa muka 20 bagian II fasal 3 sub g jang berboenji :

“Anggota-anggota pergoeroean jang mendjabat Ketoea *Pergoeroean*, *Wakil Madjelis Loehoer*, *Instroektoer* atau *Anggota Madjelis Loehoer*, dilarang doedoek dalam pengeroes sesoeatoe perkoempoelan politiek atau agama sebagai ketoea atau sekretaris, dan dilarang bekerdja aktif dalam perhimpoean-perhimpoean jang terseboet itoe atau badan politik serta agama jang lain, jang bisa memberi tjap politik atau agama kepada pergoeroean ataupoen bisa melalaikan pekerdjaan dalam pergoeroean”

Artinya didalam Taman Siswa yang tidak boleh bergabung dan menjabat suatu pangkat di organisasi lain hanya yang disebutkan. Hal itu dimaksudkan karena sebagai pengurus Majelis Luhur mempunyai Tanggung jawab yang besar dan dikhawatirkan tidak membawa kemajuan apa-apa ketika memegang dua jabatan penting dalam dua organisasi. Tetapi untuk anggota diperbolehkan asalkan itu membawa kemajuan bagi bangsanya, seperti lanjutan tulisan M, Tauchid di dalam Pusara.

“Dalam Soal ini kita haroes ingat selaloe dalam memilih pergerakan jang akan kami masoeki, jang agaknja sesoeai dengan pekerdjaan kita dalam pergoeroean. Dan tentoe sadja dalam kita bergerak diloear itu kita haroes mempoenjai kejakinan dan pedoman jang tentoem sesoeai dengan dasar dan kejakinan kita masing-masing, boekan asal bergerak, tidak karena adjakan teman, boekan karena soeroehan kawan, djangan sampai kita menjadi orang jang asal bergerak sadja, menjadji een bewegende mens”²⁵

2. Pergerakan Taman Siswa dan Hadangan Blokade Pemerintahan Kolonial

²⁴Pusara, Maret 1940 Djilid X No.3, H.54

²⁵Ibid., h.55

Berdirinya Taman Siswa di tengah–tengah keadaan rakyat yang sedang bergerak menuju Indonesia merdeka adalah sebuah keuntungan bagi Taman Siswa. Sebab, Taman Siswa lebih mudah mendapat dukungan dari organisasi pergerakan dan tokoh pergerakan. Pada waktu itu, pergerakan rakyat sedang menempuh masa peralihan, dari masa perjuangan secara kooperatif ke masa perjuangan non-kooperatif. Meskipun ketika masih di *Indische Partij*, Suwardi juga sudah menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial maka kala itu dengan cepat Taman Siswa mendapat simpati dan berbagai dukungan. Sebagai sebuah organisasi yang beranggapan bahwasanya pendidikan ala pemerintah kolonial tidak cocok dengan kehidupan rakyat Indonesia dan Taman Siswa juga menghendaki kemerdekaan nasional karenanya Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional; suatu pergerakan sosial yang menggunakan kebudayaan sendiri sebagai dasar perjuangannya.²⁶

Taman Siswa tidak hanya menghendaki pembentukan intelek di kalangan masyarakat atau bagian dari kumpulan kekecewaan terhadap masyarakat yang kecewa terhadap sekolah pemerintahan kolonial. Namun lebih dari itu, Taman Siswa sedang membantu masyarakat menuju kemerdekaan nasional seutuhnya sehingga bisa berdaulat penuh atas diri dan bangsanya. Sekolah yang didirikan oleh pemerintahan kolonial di tanah jajahan awalnya adalah bagian dari keprihatinan melihat bahwa tanah jajahan juga harus dididik dan tidak hanya dijadikan lumbung uang semata seperti dasar pemikiran adanya politik etis.

²⁶Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta :Proyek IDSN, 1989) , h. 96

Hal tersebut menjadi beda ketika diterapkan di tanah jajahan, realita yang terjadi adalah pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan kolonial tidak lain hanya sekedar bisa baca, tulis, dan hitung sehingga nantinya mereka yang telah mampu baca, tulis, dan hitung akan ditempatkan di pegawai pemerintahan dengan gaji yang kecil.

Sementara itu pendidikan yang lebih tinggi hanya bisa dirasakan oleh anak bangsawan, Eropa, dan orang-orang kaya. Sementara orang yang tidak mampu, hanya mampu mengenyam sekolah rakyat. Selain menguatnya dominasi kelas priyai muncul juga kelas-kelas sosial baru dimasyarakat serta terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Tentu hal ini dianggap melenceng dari tujuan awal politik etis yang diidamkan oleh kalangan liberal Negeri Belanda, hal tersebut memunculkan perlawanan dari segelintir kaum terdidik dari kalangan bangsawan dan priyai kecil yang baru timbul saat politik etis disebabkan keresahan mereka melihat masyarakat.

Taman Siswa sebagai salah satu wujud antitesa dari sekolah pemerintahan kolonial dan sebagai manifestasi dari keresahan kaum terdidik yang tergabung dalam paguyuban Selasa Kliwon membuat kurikulum yang saat itu sangat menghargai kebudayaan nasional. Walaupun demikian, Taman Siswa tetap berpikiran modern karena harus diakui bahwa buku-buku kala itu adalah berbahasa Belanda, Oleh sebab itu, untuk mengerti isi buku tersebut Taman Siswa juga mengajarkan Bahasa Belanda. Kurikulum yang dibuat Taman Siswa tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda masa itu, hal itu diberlakukan bukan tanpa alasan.

Hal ini diberlakukan oleh Taman Siswa karena kurikulum pemerintah kolonial tidak sesuai dengan corak masyarakat Indonesia dan hanya

berorientasi menciptakan pekerja terampil dengan bayaran murah. Berdirinya Taman Siswa dengan nama merek nasional di tengah alam kolonial beserta syarat dan cara-cara pelaksanaannya, merupakan pernyataan kesadaran bangsa dari kesesatan, sadar dari mabuk yang telah disesatkan dan diracuni oleh kolonialisme.²⁷

Taman Siswa menyadari betapa sudah jauh Belanda dengan segala politiknya meracuni pikiran rakyat Indonesia. Sehingga penggunaan kata Nasional di awal pembentukan Taman Siswa merupakan panggilan kepada rakyat Indonesia untuk kembali ke kepribadian nasionalnya yang merdeka dan bebas dari belenggu penjajah. Dinamika pergerakan nasional serta keadaan nasional yang sedang bergelora membuat salah satu organisasi pergerakan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan serangan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur. Dalam waktu kurang lebih satu minggu gerakan itu segera ditumpas oleh Pemerintahan Belanda.

Serangan tersebut mengakibatkan, organisasi pergerakan nasional sering kali mendapat intimidasi dari pemerintahan. Penyerangan tersebut pun bukanlah tanpa alasan, Pergerakan tersebut adalah puncak dari pemogokan-pemogokan, dan protes yang dilakukan oleh kaum terpelajar saat itu. Kekesalan itu bermula dari pengetatan dan kenaikan pajak hingga 40% yang dilakukan guna menutupi pengeluaran saat Perang dunia satu terjadi. Krisis ekonomi di Hindia Belanda sudah tidak bisa lagi dihindarkan.

Ditengah represifnya pemerintahan kolonial pasca pergerakan 1926, Partai Nasional Indonesia (PNI) mengumpulkan seluruh organisasi berpaham Nasionalis untuk membentuk sebuah kesatuan dan solidaritas Indonesia yang

²⁷Mochammad Tauchid, *Cita-cita dan ilmu hidup Taman Siswa*, dalam *Taman Siswa 50 Tahun*, (Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1952) h.109

diberi nama Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia dibentuk di Bandung 17—18 Desember 1927. Organisasi-organisasi ini meliputi seluruh kekuatan politik utama sejak runtuhnya PKI pada permulaan tahun 1927.²⁸ Kongres awal PPPKI diadakan tanggal 31 Agustus 1928 dan dalam organisasi ini tampil Ki Hajar Dewantara sebagai wakil dari Taman Siswa untuk memberikan prasaran. Prasaran tersebut berjudul “Pengajaran dan Penghidupan rakyat”.

Ditahun itu pula nama Suwardi Suryaningrat sudah dilepaskan seiring dengan ulang tahunnya yang ke-40 dan menggantinya dengan Ki Hajar Dewantara. Inti dari pembicaraan Ki Hajar di kongres PPPKI adalah mengenai perlunya pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan manusia yang merdeka, berlepas diri dari bantuan yang mengikat serta mendirikan pusat bagi pendidikan nasional. Tentu apa yang dibicarakan oleh Ki Hajar tersebut sudah dilakukan oleh Taman Siswa yang memang sudah menolak subsidi dan mendirikan paguron sebagai pusat pengajaran sehingga sedikit banyak ide dan gagasan yang dibawa PPPKI dalam bidang pendidikan terpengaruh oleh ide Taman Siswa.

Sekalipun sebenarnya ide Ki Hajar dikritik oleh kalangan Muhammadiyah seperti yang dikatakan Kenji Tsuchiya dalam bukunya *Democracy and Leadership: The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia* (1992:162) “Seorang wakil sekolah-sekolah Muhammadiyah mengkritik konsep dewantara tentang pendidikan nasional, yang katanya berakar pada masa silam pra-islam”. Sekalipun ada kritikan, PPPKI tetap

²⁸Kenji Tsuchiya, *Democracy and Leadership : The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia*, terj. H.B. Jassin (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), h. 161

membuat komisi pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyusun program untuk pelaksanaan pendidikan nasional.

Komite Pengajaran Nasional PPPKI melakukan rapat dua kali di kantor pusat Taman Siswa di Yogyakarta, untuk membicarakan usul-usul kongkrit guna mengadakan sistem pendidikan nasional. Usul-usul tersebut terealisasi dengan dibentuknya *Concentratie Pengajaran Nasional* (CPN). Usul mendirikan CPN adalah perwujudan dari suatu gagasan yang terkandung dalam pidato Dewantara di depan majelis PPPKI. Sejak itu timbul rumusan Ki Hadjar Dewantara tentang hubungan gerakan politik dan sekolah-sekolah bangsa sendiri, “Taman Siswa dan segala lapangan usaha sosial lainnya merupakan ladang atau sawah, dimana orang memupuk apa yang perlu bagi kehidupannya. Gerakan politik merupakan pagar, yang melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman”.²⁹

PPPKI menjadi sarana Taman Siswa untuk mengeksperisikan gagasan pendidikannya di kancah nasional, serta menaikkan pamor Taman Siswa dalam hal gagasan pendidikan kebangsaan. Meningkatnya pamor Taman Siswa tidak sejalan dengan keadaan Indonesia. Situasi yang masih dalam suasana krisis di Hindia Belanda membuat pemerintah semakin represif sehingga membuat umur PPPKI tidak lama seiring dengan ditangkapnya pemimpin-pemimpin nasional seperti Soekarno dan pemimpin PPPKI lainnya.

Situasi itu diperumit dengan depresi ekonomi ekonomi. Kala itu, ekspor menurun, akibatnya pemerintah menaikkan pajak hingga depresi ekonomi 1930. Tak hanya itu, Gubernur Jenderal de Jonge menerapkan

²⁹Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) , h. 276

beberapa peraturan yang melarang berkumpul dan rapat. Politik reaksioner yang dilakukan oleh Jonge juga diimplementasikan dengan membuang Soekarno, Hatta, dan semua yang terlibat dalam pergerakan 1926. Pemerintahan Kolonial melakukan tindakan kekerasan antara lain melarang pegawai negeri menjadi anggota suatu partai. Polisi melakukan penggeledahan di rumah pemimpin-pemimpin partai, menangkap dan menahan para pemimpin.³⁰

Politik menindas juga diterapkan tidak hanya ke kader atau pemimpin partai yang bersangkutan namun juga ke partai politik itu sendiri seperti yang terjadi ke PNI dan Partindo yang dibubarkan oleh pemerintahan kolonial. Politik de Jonge juga menciptakan peraturan *Toezicht Ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan) pada 1 Oktober 1932 yang dapat menolak izin untuk menyelenggarakan pengajaran apabila dipandang membahayakan ketertiban masyarakat.³¹ Peraturan tersebut sudah tentu mendapat pertentangan hebat karena artinya pemerintahan Kolonial Belanda sangat kurang memberi kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk menuntut pelajaran. Sebetulnya sejak awal 1920-an, pemerintah kolonial berkali-kali berusaha untuk mengawasi sekolah-sekolah yang menurut pemerintah adalah sekolah liar. Sekolah yang diawasi adalah sekolah keturunan Tionghoa, Sekolah Sarekat Islam di Semarang yang diinisiasi oleh Tan Malaka, dan Taman Siswa. Pemerintah kolonial menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut menanamkan perasaan anti-Belanda. Sehingga pemerintah memerintahkan setiap sekolah dan guru-gurunya untuk melapor.

³⁰Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta :Proyek IDSN, 1989) ,h. 117

³¹Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: BalaiPustaka, 2010), h. 67

Taman Siswa sendiri sadar jika *Toezicht Ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan) atau yang lebih dikenal dengan *Onderwijs Ordonantie* (O.O) atau ordonansi sekolah liar dilaksanakan, maka akan merugikan bagi sekolah-sekolah masyarakat terlebih lagi dalam salah satu pasal ordonansi tersebut terdapat isi bahwa pemerintah memiliki kuasa penuh untuk mengurus wujud dan isi sekolah tersebut mulai dari bangunan, guru, hingga kurikulumnya. Artinya jika ini terjadi cita-cita Taman Siswa membentuk manusia merdeka cepat atau lambat akan berakhir. Oleh sebab itu, Ki Hajar mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang isinya mempertanyakan ordonansi tersebut yang dianggap tergesa-gesa dan membuktikan kebingungan dan ketakutan dari pemerintah serta memperingatkan bahwa Taman Siswa akan melakukan perlawanan sekuat-kuatnya dan selama-lamanya.

Pada awal 1933, rapat-rapat dibubarkan karena ucapan-ucapan mereka yang dipandang oleh polisi sebagai hasutan untuk memberontak, antara lain di Surabaya, Purworejo, Probolinggo, Cilacap, dan Kebumen.³² Represivitas yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial membuat organisasi pergerakan nasional justru semakin memiliki propaganda lebih tentang perlunya kemerdekaan nasional sebagai jembatan menuju masyarakat yang berdaulat. Reorientasi gerakan yang dilakukan oleh tokoh pergerakan saat itu nyatanya tidak mengubah tujuan perjuangan mereka, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Hal itu pun terjadi pada Taman Siswa yang mulai menyiapkan strategi agar ordonansi tersebut dibatalkan. Selain itu memotong cita-cita Taman Siswa tentu dengan berlakunya Ordonansi tersebut hak ibu atau rakyat untuk memilih cara pendidikan bagi anaknya telah direbut.

³²Ibid, h,68

Dengan hak diktator yang dimiliki oleh Ki Hajar, maka ia menyerukan kepada seluruh cabang Taman Siswa di seluruh negeri untuk melawan secara aktif maupun pasif. Aktif artinya melawan jika memang kekuatan seimbang dengan yang dilawan namun jika tidak maka harus diam secara batin, artinya harus kuat menderita, tidak boleh marah, tergoda, apalagi takluk.

Perlawanan dilakukan bukan hanya dalam internal Taman Siswa, melainkan Ki Hajar juga mengeluarkan maklumat kepada seluruh pemimpin pergerakan rakyat untuk mendukung pembatalan ordonansi pengajaran baik secara moral maupun material. Maklumat tersebut berisi sembilan butir yang kurang lebih isinya ialah bahwa perlawanan diam-diam yang dilakukan untuk membatalkan ordonansi tersebut segenap organisasi pergerakan rakyat harus tenang dan tidak gegabah serta harus saling membantu jikalau ada sekolah yang terkena dampak dari ordonansi tersebut.³³

Dewantara menjelaskan pandangannya mengenai ordonansi itu dan arti tindakan-tindakannya. Ia merasa, ordonansi itu menghilangkan hak azasi orang tua dan rakyat untuk memilih bagaimana mendidik anaknya, ordonansi itu berusaha mengawasi sekolah-sekolah yang dijalankan tanpa subsidi pemerintah, yakni sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh rakyat, yang dipelihara dengan donasi-donasi rakyat, dan adalah milik rakyat.³⁴

Cabang-cabang Taman Siswa pun mulai berkumpul di tingkat golongan untuk membicarakan perihal ordonansi tersebut yang menurut mereka tidak sah atas dasar kemanusiaan dan memberi dukungan penuh terhadap Ki Hajar perihal pendiriannya serta penolakan terhadap ordonansi tersebut. Golongan

³³ Lampiran mengenai 9 Butir maklumat Ki Hajar untuk seluruh organisasi pergerakan rakyat bisa dilihat di Lampiran

³⁴ Kenji Tsuchiya, *Democracy and Leadership : The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia*, terj. H.B. Jassin (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), h. 278

Politik pertama memberikan respons kepada ordonansi ialah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Pada 1 Oktober 1932, ordonansi mulai berlaku, partai mengeluarkan pengumuman di Bandung atas nama wakil presidennya, Abikusno Tjokrosujoso, dan Sekretarisnya, S.M. Kartrosuwiryo.³⁵ Menurut PSII, ordonansi itu menghalangi hak dan kewajiban rakyat untuk mendidik dirinya sendiri. Selain itu, PSII juga mengultimatum pemerintah jika sampai 1 April 1933 ordonansi tersebut tidak dibatalkan maka akan ada aksi massa, hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Taman Siswa serta untuk melindungi sekolah milik PSII.

Selanjutnya berturut-turut dukungan datang dari guru-guru sekolah swasta di Jawa Timur, Istri Sedar, Partai Indonesia (PI), Majelis Guru Perguruan Rakyat, Partai Bangsa Indonesia, dan masih banyak lagi golongan serta partai yang menyatakan dukungan terhadap Ki Hajar. Mereka menyatakan penolakannya terhadap ordonansi tersebut karena selain tidak akan memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia hal itu juga merupakan pengekangan hak terhadap siswa untuk bersekolah. Keadaan ini terus berlangsung hingga surat kabar pun banyak memberitakan tentang hal ini. Perlawanan Ki Hajar Dewantara bersama Taman Siswa menghadapi O.O mendapat sambutan yang amat besar di kalangan masyarakat luas. Seluruh pergerakan rakyat baik yang bersifat politik, agama, maupun sosial secara serentak mendukung perlawanan ki Hajar, sehingga perlawanan tersebut menjadi aksi massa.³⁶

Akibat sikap ki Hajar terhadap O.O itu. maka pada 19, 20 dan 21 Oktober 1932 kuasa pemerintah untuk urusan umum di dalam *Volksraad*, Mr.Ir

³⁵Ibid., h.315

³⁶Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta :Proyek IDSN, 1989) h. 123

Kiewiet de Jonge datang berunding di “pondok dewantara”.³⁷ Dalam pembicaraan yang berlangsung tiga hari tersebut kedua belah pihak mengakui harus ada kompromi namun bagi Ki Hajar kompromi diartikan sebagai penghapusan ordonansi tersebut. Selagi perundingan dan perlawanan dilakukan, korban dari ordonansi mulai terlihat. Korban pertama adalah guru di cabang Cikoneng, Jawa Barat. Ketua cabang Taman Siswa itu dimajukan ke pengadilan dan dikenakan denda.

Masalah ini kemudian dibawa ke *Volksraad*, Wiratnakusumah es mengajukan usul membuat undang-undang yang salah satu maksudnya adalah menarik kembali ordonansi selama satu tahun. Wiratnakusumah juga mengancam akan keluar dari *Volksraad* jika tuntutananya tidak dipenuhi. Pada 13 Februari 1933 keluar ordonansi baru, menurut keputusan gubernur jenderal tanggal 13 Februari no.18, untuk membatalkan *onderwijs ordonantie* 17 September 1932 no.494 dan berlaku mulai 21 Februari 1933.³⁸ Meskipun telah menang dan ordonansi telah dicabut namun Ki Hajar tetap mengingatkan agar tetap awas dalam menghadapi setiap kondisi yang akan terjadi.

3. Taman Siswa dalam Penjajahan oleh Bangsa Jepang sampai kemerdekaan Indonesia.

Munculnya Jepang sebagai kekuatan baru dunia saat itu serta kekalahan Belanda terhadap Jepang membuat Belanda harus menyerahkan Indonesia sebagai tanah jajahannya ke Jepang tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang

³⁷Ibid, h.123

³⁸ Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta : UST Press, 1952)

di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada 8 Maret 1942, dengan demikian berakhirlah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan Jepang. Sejarah Indonesia memasuki suatu periode baru yaitu periode pendudukan Militer Jepang.³⁹

Datangnya Jepang ke Indonesia datang dalam rangka menjadi pemimpin di daerah Asia. Jepang dengan semboyan Pan-Asia atau “Asia untuk bangsa Asia” berusaha menyusun dan menertibkan penduduk dan sumber-sumber daerah –daerah yang luas dari pantai–pantai Timur Afrika sampai di Lautan Pasifik Barat sebagai dasar untuk memimpin dunia.⁴⁰ Kedatangan Jepang ke Indonesia tentunya membawa sistem baru yang akan mengubah kehidupan sebelumnya. Artinya Jepang ke Indonesia berusaha menghilangkan sistem Belanda dan mengubahnya dengan sistem ala Jepang.

Terbukti ketika Jepang menguasai Indonesia Jepang langsung menerapkan beberapa sistem dan aturan baru seperti membuat pemerintah militer yang dibagi tiga. Namun, demi kelancaran administratif dan pemerintahan. Kekuasaan hukum dan undang-undang pemerintah sebelumnya tetap diakui sementara oleh pemerintah militer Jepang asal tidak bertentangan.

Dengan membawa semangat Pan-Asia masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada bulan-bulan pertama mendapat sambutan yang baik dari penduduk setempat. Tokoh-Tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah pendudukan Jepang. Padahal sebelumnya pada masa pemerintah kolonial Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Faktor yang menyebabkan

³⁹Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 14

⁴⁰Hans Kohn, *Nasionalisme arti dan Sejarahnya* (Jakarta : Erlangga, 1984) , h.94

kesediaan bekerja sama itu adalah kebangkitan bangsa-bangsa timur.⁴¹ Dengan janji akan diberi kemerdekaan Jepang maka tokoh pergerakan kala itu mau bekerjasama dan yakin akan Jepang.

Sama halnya dengan zaman pemerintah kolonial Belanda, pemerintah militer Jepang pun juga memberlakukan pelarangan berdirinya organisasi selain yang direstui Jepang, juga diterapkan pelarangan sekolah umum. Sebabnya, pada masa Jepang pendidikan umum bukan suatu yang menjadi fokus Jepang yang kala itu sedang menghadapi perang Asia Timur Raya. Meski begitu, Jepang menyadari pentingnya pendidikan karena melalui pendidikan mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia dapat diubah dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran Jepang. Melalui pendidikan, tercipta kader-kader khususnya para pemuda yang diharapkan Jepang.⁴²

Jepang hanya memfokuskan rakyat Indonesia untuk siap berperang akhirnya banyak pula pamong Taman Siswa yang masuk Pembela Tanah Air (PETA) atau HEIHO (Pembantu Tentara Jepang). Namun, ada yang sedikit berubah di zaman Pemerintah militer Jepang yaitu diberlakukannya penghapusan diskriminasi golongan dalam pendidikan, dan dibuatnya jenjang baku dalam pendidikan, yaitu sekolah dasar enam tahun, sekolah menengah tiga tahun, dan sekolah menengah atas tiga tahun dengan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah swasta boleh berdiri asalkan langsung diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri. Artinya sekolah-sekolah tersebut boleh kembali beroperasi asalkan mau mengikuti kurikulum dan berpendidikan seperti yang diberikan oleh Jepang.

⁴¹Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) ,h. 27

⁴²Ibid., h.95

Jika zaman pemerintah kolonial Belanda pelarangan sekolah disikapi Ki Hajar Dewantara dengan perlawanan dan menggalang kekuatan, maka di zaman pemerintah militer Jepang Ki Hajar menyikapi dengan cara berbeda. Sebab, Ki Hajar menganggap datangnya Jepang ke Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua serta menjanjikan kemerdekaan haruslah dimanfaatkan. Larangan Jepang tentang swasta mendirikan sekolah umum dan guru disikapi dengan cara seperti kepompong, Bersikap pura-pura mati tapi sebenarnya hidup.⁴³ Mati dalam arti ada beberapa sekolah yang harus berganti rupa atau bahkan ditutup, hidup dalam arti Taman siswa tetap melakukan pengajaran secara gerilya. Bahkan Taman Siswa Jakarta yang kala itu dipimpin oleh Ki Mangunsarkoro menutup Taman Siswa Jakarta disebabkan larangan sekolah umum tersebut. Lantas, cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia pun banyak berkurang dan sekalipun bertahan harus tetap bersikap seperti kepompong dan mengganti rupa sekolah menjadi sekolah kejuruan. Seperti yang tertuang pada rapat besar Umum Taman Siswa IV pada 26 hingga 28 Maret di Yogyakarta :

Dulu cabang kita banyak, sekarang tinggal sedikit, entah besok atau lusa. Kita tidak mempunyai kekuatan menghadapi bayonet. Karenanya kita “ngentung” kata orang. Kita hidup seperti “*enthung*”, kepompong, bakal kupu-kupu: Jika sudah sampai saatnya, bolehlah kita lalu terbang kian kemari semerdekanya sampai dimana-mana. Atau kita mempertahankan hidup kita asal tidak mati, seperti yang diumpamakan : Pelita yang menyala walaupun sinarnya sekecil-kecilnya! Pada saat yang segenting itu kita pelihara baik-baik kekeluargaan dan kebudayaan kita.⁴⁴

Dikeluarkannya Osamu Seirei No.22 /2604 (1944) mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta, kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah baru diberikan kepada Jawa Hokokai, sedang swasta lainnya hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa.⁴⁵ Pembukaan sekolah kejuruan dan bahasa sesuai dengan kepentingan Jepang yaitu hal-hal yang bersifat

⁴³Wawancara dengan Ki Sunarno tanggal 12 April 2016 di Taman Siswa Jakarta.

⁴⁴ Sajoga, *Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922-1952*, dalam *Taman Siswa 30 Tahun*, (Yogyakarta: UST Press, 1952) h.264

⁴⁵Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: BalaiPustaka, 2010) , h.95

komunikasi dan teknis untuk berperang serta mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung perang. Begitu pula yang terjadi pada Taman Siswa yang akhirnya mengikuti aturan Jepang. Taman dewasa dan Taman Madya itu dijadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian/ Taman Tani dan SMK keputrian/ Taman Rini, keputusan itu harus dijalankan Taman Siswa demi mengelabui Jepang, dan disebabkan saat itu perguruan sedang libur maka pihak perguruan terpaksa mengirimkan pengumuman kepada orang tua murid masing-masing.⁴⁶

Pada 6 Juni 1944 Taman Siswa Mataram terpaksa menerima uang dari pemerintah Jepang sebesar f.20.000, untuk persiapan pendirian Taman Tani.⁴⁷ Uang tersebut tidak digunakan untuk nafkah, tetapi digunakan untuk membeli alat-alat dan tanah. Pada 19 Juni 1944 Taman Tani resmi dibuka dan dihadiri oleh Sri Sultan Pakualam, Kepala Daerah Jajahan Jepang dan pembesar-pembesar lainnya. Pelajaran tentang nasionalisme dan pelajaran umum tetap diberikan jikalau pengawasan Jepang tidak ada, disamping pelajaran wajib seperti bahasa Jepang, Kemiliteran, dan Olahraga. Sementara itu, Pada 2 Agustus 1944 Taman Rini dibuka. Jumlah murid yang awalnya banyak disebabkan aturan tentang perubahan sekolah ini mengalami penurunan drastis.

Di tengah politik yang fasis dan keadaan Taman Siswa yang banyak mengalami penutupan cabang, Taman Siswa tetap berhubungan erat dengan tokoh pergerakan nasional kala itu seperti Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara yang memang lebih banyak berkecimpung bersama tokoh pergerakan lainnya guna mengetahui perkembangan politik nasional. Pada 7 September 1944 diumumkan bahwa bangsa Indonesia akan dapat kemerdekaannya di kemudian

⁴⁶Wawancara dengan Ki Sunarno tanggal 12 April 2016 di Taman Siswa Jakarta

⁴⁷ Sajoga, Loc.cit., h.263

hari. Mulai waktu itu bendera merah putih disamping bendera Jepang dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam keadaan yang seperti itu Majelis Luhur menyatakan bahwa Taman Siswa siap sedia menjunjung kewajiban menyongsong kemerdekaan Indonesia merdeka kepada tokoh pergerakan nasional saat itu. Bentuk Jepang dalam meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan sesuai dengan janji Jepang adalah dengan membuat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diresmikan pada 28 Mei 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Badan ini berfungsi untuk merumuskan Undang-Undang Dasar.

Dalam badan itu terdapat pula Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu perwakilan. Pada hal ini Ki Hajar Dewantara berkesempatan memasukan konsepsinya yang secara kebetulan banyak bersamaan dengan konsepsi Soekarno tentang Indonesia. Salah satu contohnya, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, hal itu sudah dilakukan oleh Taman Siswa sejak awal pembentukannya.⁴⁸ Bahkan dalam perjalanannya Taman Siswa kerap kali merasakan kekurangan dalam hal finansial namun hal itu tidak menjadi hambatan dan justru membuktikan bahwa Taman Siswa mampu berdiri tanpa bantuan ataupun subsidi, hal inilah yang coba dimasukan menjadi dasar negara Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara.

⁴⁸Wawancara dengan Ki Sunarno tanggal 12 April 2016 di Taman Siswa Jakarta